

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA BONTANG NOMOR 32 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2016

**BAB III . RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan kerangka ekonomi Kota Bontang merupakan hasil kajian dan analisis statistik terhadap perkembangan indikator-indikator makro ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik internal maupun eksternal. Melalui analisis terhadap perkembangan dan karakteristik perekonomian Kota Bontang hingga tahun 2015, selanjutnya dilakukan perkiraan prospek perekonomian tahun 2015-2016. Pada Bab ini juga dibahas mengenai tantangan perekonomian Kota Bontang dengan mengacu pada dinamika perekonomian daerah, nasional, maupun global.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kota Bontang

3.1.1.1. Perkembangan PDRB

Perekonomian Kota Bontang masih sangat kental dengan ketergantungan pada sektor industri pengolahan gas alam dan kimia. Hingga tahun 2015 peran sektor tersebut masih mencapai 85 persen dari keseluruhan nilai PDRB Kota Bontang yang mencapai Rp.57,6 triliun. Dengan peran yang sangat dominan tersebut menyebabkan pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi secara aggregate menjadi sangat signifikan. Trend menurunnya produksi industri pengolahan gas alam cair oleh PT. Badak N.G.L. menjadi pemicu utama tren melambatnya perekonomian Kota Bontang, khususnya hingga tahun 2014.

PDRB Kota Bontang berdasarkan harga berlaku tahun 2015 relatif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini utamanya disebabkan menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan dari Rp.50,4 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp.49,0 triliun pada tahun 2015. Namun demikian pada sisi PDRB dengan perhitungan harga konstan justru mengalami peningkatan, informasi secara lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 PDRB Kota Bontang Tahun 2014 dan 2015

No	Lapangan Usaha/Industry	Harga Berlaku (Rp.Juta)		Harga Konstan (Rp.Juta)	
		2014*	2015**	2014*	2015**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	452.528,34	514.223,07	353.995,35	375.562,92
2	Pertambangan dan Penggalian	1.117.139,80	621.475,84	665.860,47	476.467,20
3	Industri Pengolahan	50.368.892,07	49.061.304,60	34.869.242,97	36.292.544,55
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.113,16	11.566,92	8.438,30	10.852,69

No	Lapangan Usaha/Industry	Harga Berlaku (Rp.Juta)		Harga Konstan (Rp.Juta)	
		2014*	2015**	2014*	2015**
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.687,23	9.289,88	7.480,24	7.790,20
6	Konstruksi	2.407.377,97	2.528.473,04	1.991.244,34	2.029.310,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.276.902,84	1.365.676,59	1.039.278,32	1.068.436,46
8	Transportasi dan Pergudangan	587.972,51	618.681,38	516.466,81	529.136,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203.618,12	219.928,70	155.377,73	159.432,26
10	Informasi dan Komunikasi	348.125,10	368.233,97	339.822,49	358.143,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	387.396,91	403.136,96	304.999,72	305.009,03
12	Real Estat	198.778,07	208.759,22	175.203,28	181.384,19
13	Jasa Perusahaan	211.229,93	219.231,42	192.842,58	197.376,94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	583.551,41	655.250,88	428.262,12	451.576,78
15	Jasa Pendidikan	369.590,83	422.869,14	277.125,45	302.045,51
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	256.769,49	278.208,26	195.058,97	199.987,85
17	Jasa lainnya	118.511,08	128.256,96	100.834,28	106.455,34
Produk Domestik Regional Bruto		58.904.184,86	57.634.566,83	41.621.533,42	43.051.512,87
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product @		21.004.395,71	23.578.933,92	17.189.929,54	18.196.441,50

Keterangan: *) Angka Sementara dan **) Angka Sementara
 Sumber: BPS Kota Bontang 2016

Untuk melihat perekonomian Kota Bontang secara lebih ril digunakan perhitungan PDRB dengan mengeluarkan unsur Migas. Nilai PDRB Kota Bontang tanpa migas terlihat mengalami peningkatan baik dengan perhitungan harga berlaku maupun dengan harga konstan. Berdasarkan harga berlaku PDRB Kota Bontang meningkat dari Rp.21 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp.23,6 triliun, sedangkan berdasarkan harga konstan meningkat dari Rp.17,2 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp.18,2 triliun pada tahun 2016.

Berdasarkan tingkat pertumbuhannya, perekonomian Kota Bontang selama tahun 2011-2015 meskipun mengalami pertumbuhan negatif, namun dilihat dari kecenderungannya mengalami tingkat pertumbuhan yang terus mengalami perbaikan, dan pada tahun 2015 berdasarkan angka sangat sementara BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang kembali mencapai pertumbuhan yang positif mencapai 3,4 persen. Capaian tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut secara sektoral terdorong utamanya oleh peningkatan produksi sektor industri pengolahan. Dapat dilihat juga dari Tabel 3.1 bahwa, dengan perhitungan harga konstan, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami peningkatan kecuali sektor primer (pertambangan dan penggalian). Indikasi yang cukup baik ini diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan ekonomi Kota Bontang pada masa depan yang lebih stabil dan secara bertahap dapat menstimulasi perbaikan sektor-sektor ekonomi masyarakat.Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang ditampilkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang
 Tahun 2010-2015

Tahun	Dengan Migas	Tanpa Migas
2015	3,4	5,9
2014	-3,23	3,7
2013	-5,7	8,6

2012	-9,2	15,6
2011	-7,4	4,8

Sumber: BPS Kota Bontang 2016

3.1.1.2. Struktur Ekonomi

Kota Bontang merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai PDRB relatif tinggi di Indonesia. Pada tahun 2015 total PDRB Kota Bontang dengan migas mencapai Rp.57,6 Triliun. Dari total PDRB tersebut 85,12 persen dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dan sebagian besarnya adalah kontribusi industri pengolahan gas alam cair dan kimia. Tingginya nilai PDRB tersebut sering disalah persepsikan dengan memberi label Kota Bontang sebagai daerah kaya sumber daya alam. Pada kenyataannya Kota Bontang hanyalah daerah pengolah, sedangkan sumber daya alam (gas) yang diolah bersumber dari Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan tingginya dominasi sektor industri pengolahan tersebut, menggambarkan bahwa struktur ekonomi Kota Bontang sangat kuat dicirikan oleh peran sektor industri. Dengan skala kota yang tergolong kecil, peran sektor industri ini sangat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Fluktuasi kontribusi sektor industri tersebut akan secara langsung berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.Struktur ekonomi Kota Bontang dapat dilihat dari distribusi sektoral sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Distribusi Persentase PDRB Kota Bontang Dan Tingkat Pertumbuhan Sektoral Tahun 2014-2015

No	Lapangan Usaha/Industry	HargaBerlaku		Harga Konstan		Tingkat Pertumbuhan
		2014*	2015**	2014*	2015**	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,77	0,89	0,85	0,87	6,1
2	Pertambangan dan Penggalian	1,90	1,08	1,60	1,11	-28,4
3	Industri Pengolahan	85,51	85,12	83,78	84,30	4,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,03	28,6
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,02	0,02	0,02	4,1
6	Konstruksi	4,09	4,39	4,78	4,71	1,9
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,17	2,37	2,50	2,48	2,8
8	Transportasi dan Pergudangan	1,00	1,07	1,24	1,23	2,5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,35	0,38	0,37	0,37	2,6
10	Informasi dan Komunikasi	0,59	0,64	0,82	0,83	5,4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,66	0,70	0,73	0,71	0,0
12	Real Estat	0,34	0,36	0,42	0,42	3,5
13	Jasa Perusahaan	0,36	0,38	0,46	0,46	2,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,99	1,14	1,03	1,05	5,4

No	Lapangan Usaha/Industry	HargaBerlaku		Harga Konstan		Tingkat Pertumbuhan
		2014*	2015**	2014*	2015**	
15	Jasa Pendidikan	0,63	0,73	0,67	0,70	9,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,44	0,48	0,47	0,46	2,5
17	Jasa lainnya	0,20	0,22	0,24	0,25	5,6
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	3,4

Sumber: BPS Kota Bontang 2016

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa secara umum tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam komposisi distribusi PDRB Kota Bontang antara tahun 2014 dan 2015 berdasarkan kontribusi sektoralnya. Namun jika dilihat berdasarkan pertumbuhannya, terlihat bahwa masing-masing sektor mengalami pertumbuhan nilai cukup signifikan di tahun 2015. Terkecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan -28,4 persen pada tahun 2015. Hal ini sangat beralasan mengingat harga komoditas secara global memang sedang mengalami penurunan cukup dalam. Hal ini kelihatannya berdampak pada menurunnya gairah investasi pada sektor terkait.

3.1.1.3. Inflasi

Tingkat Inflasi Kota Bontang mengacu pada perhitungan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2011 tingkat inflasi *year on year* Kota Bontang mencapai 6,35 persen relatif lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Kota Samarinda sebagai daerah Kota yang memiliki hubungan aktivitas ekonomi terdekat yang mencapai 6,74 persen. Sedangkan untuk tahun 2015 jika mengacu pada tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur maka tingkat inflasi Kota Bontang mencapai 4,89 persen juga masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi Samarinda yang mencapai 6,87 persen.

Tabel 3.4Tingkat Inflasi Kota Bontang Tahun 2015

Tahun	Bontang	Samarinda
2011	6,35	6,74
2012	5,6	4,81
2013	9,65	10,37
2014	7,66	6,74
2015	4,89	6,87

3.1.1.4. PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita adalah salah satu indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran yang dicapai oleh penduduk suatu daerah. Indikator ini menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan per jiwa dalam satu entitas wilayah dalam satu tahun. Dengan mengurangi penyusutan dan pajak tidak langsung, maka diperoleh

pendapatan per kapita. Dengan penyajian secara berkala data pendapatan per kapita, selanjutnya dapat dilihat perubahan tingkat kemakmuran masyarakat suatu daerah. Namun demikian indikator ini tidak dapat serta-merta menjadi ukuran mutlak untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk suatu wilayah. Indikator ini mengabaikan tingkat pemerataan sebaran nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu entitas wilayah.

Untuk menunjukkan tingkat perbaikan kemakmuran masyarakat di Kota Bontang secara lebih riil digunakan angka PDRB dan pendapatan per kapita tanpa migas. Dengan mengeluarkan unsur nilai tambah migas, PDRB dan pendapatan per kapita tidak lagi dipengaruhi oleh adanya fluktuasi baik produksi maupun harga migas.

Tabel 3.5 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Tanpa Migas

Tahun	PDRB	Pendapatan
2015	144.367.301,72	N/A
2014	131.594.946,01	21.477.391,00
2013	133.440.531,65	20.445.565,21
2012	116.776.087,49	19.665.681,08
2011	97.986.872,89	18.841.514,80

PDRB Per Kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku selama tahun 2011-2015 menunjukkan tren peningkatan, kecuali pada tahun 2014 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan sektor-sektor ekonomi sehingga masyarakat dimungkinkan untuk lebih produktif dan mendapatkan peningkatan pendapatan. PDRB per kapita Kota Bontang meningkat dari Rp.97,9 juta pada tahun 2011 menjadi Rp.144,4 juta pada tahun 2015. Sedangkan Pendapatan per kapita mengalami peningkatan dari Rp. 18,8 juta tahun 2011 menjadi Rp. 21,5 juta pada tahun 2014.

Dengan memperhatikan tren peningkatan indikator makro ini, dapat diproyeksikan bahwa daya beli masyarakat dan perekonomian Kota Bontang akan cenderung terus mengalami peningkatan di masa yang akan datang khususnya perekonomian tanpa migas.

3.1.1.5. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan pembangunan Kota Bontang yang masih sangat memerlukan penanganan serius Pemerintah Kota Bontang. Dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit di banding kabupaten/kota lainnya, jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran menjadi relatif tinggi. Hingga tahun 2014 menurut perhitungan BPS, Jumlah penduduk miskin Kota Bontang mencapai 8.215 jiwa atau 5,10 persen dari jumlah penduduk. Meskipun secara persentase mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 5,21 persen namun secara jumlah justru mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Kota Bontang

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk miskin (jiwa)	9.270	8.100	8.018	8.215	N/A
	Persentase jumlah penduduk miskin	6,31	5,20	5,21	5,10	N/A
2.	Jumlah Penduduk Tidak Bekerja (jiwa)	9.948	11.158	7.939	7.095	9.524
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	14,15	14,38	11,05	9,38	12,73

Selanjutnya jumlah penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau menganggur mencapai 9.524 jiwa atau 12,73 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Tingkat pengangguran ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 09,38 persen. Menurunnya harga komoditas, khususnya komoditas tambang batu bara menyebabkan penurunan aktivitas tambang yang berimplikasi pada pengurangan tenaga kerja pada sektor tersebut. Diketahui bahwa meskipun aktivitas pertambangan bukan berlokasi di Kota Bontang, namun sebagian penduduk Kota Bontang bekerja pada sektor pertambangan ataupun sektor jasa yang terkait dengan aktivitas pertambangan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tahun 2016 dan 2017 di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang tercakup dalam tahapan ke-3 (2015-2019) yang merupakan tahap penguatan terhadap capaian pembangunan dua tahapan sebelumnya. Dalam lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tahun 2016 merupakan tahun transisi dari periode RPJMD 2011-2016 ke periode RPJMD 2016-2020. Dalam kaitan tersebut penyusunan RKPD tahun 2016 harus mempertimbangkan tantangan dan prospek perekonomian Kota Bontang serta memperhatikan sasaran kebijakan pembangunan ekonomi sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan nasional.

Secara nasional pertumbuhan ekonomi tahun 2016 masih akan sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi global utamanya terkait dengan dampak-dampak dari masih rendahnya harga komoditas akibat menurunnya permintaan. Namun demikian di dalam RKP tahun 2016 pertumbuhan ekonomi nasional di tetapkan sebesar 5,8-6,2 persen, relatif lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Adapun asumsinya adalah adanya trend membaiknya perekonomian global dan didukung oleh berlanjutnya reformasi struktural di dalam negeri secara komprehensif.

Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut penguatan investasi menjadi perhatian utama pemerintah. Oleh karena itu arah kebijakan ekonomi nasional lebih dititikberatkan pada pembenahan dan penyederhanaan proses perijinan dan kepastian berusaha secara berkelanjutan untuk mendorong investasi

yang lebih tinggi serta penerapan upaya konkrit untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat dan adil.

Dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 menetapkan tema “Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi produk unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah”. Tema tersebut merupakan tahapan pembangunan Kaltim dalam rangka melakukan percepatan transformasi ekonomi dari industri ekstraktif kepada ekonomi industri yang lebih berkelanjutan. Fokus pembangunan ekonomi di dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau yang seluas-luasnya melalui pemberdayaan pertanian di Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi Hijau dimaknai dengan perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan serta hemat sumber daya alam. Perluasan pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pada tahun 2016 fokus pembangunan ekonomi provinsi Kaltim menargetkan pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar 3,6-4,3 persen (LPE migas) dan 7,7-8,3 persen (LPE non migas);
2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi unggulan daerah sebesar 8,00 persen;
3. Tercapainya swasembada pangan sebesar 82,01 persen;
4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 1,62 persen;

a. Tantangan

Meperhatikan tren pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2014 – 2015 serta dinamika perkembangan ekonomi nasional, dapat dirumuskan tantangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi Kota Bontang tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut:

1. Terjadinya peningkatan nilai dari sektor industri pengolahan pada tahun 2015 cukup menjanjikan bagi perkiraan perbaikan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Tantangannya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan 2017 dapat masih mengalami pertumbuhan positif meskipun dalam situasi ekonomi global yang masih mengalami perlambatan. Belum membaiknya harga-harga komoditas yang terkait dengan tingkat permintaan global akan memberikan tekanan bagi upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang masih sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor primer.
2. Meskipun pertumbuhan ekonomi telah tumbuh positif mencapai 3,4 persen pada tahun 2015, namun kelihatannya tidak memberikan dampak pada serapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran justru mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 12,73 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 sebesar 9,38 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi tanpa migas relatif tinggi, daya serapnya terhadap tenaga kerja relatif kecil karena skala

ekonomi yang relatif kecil dibandingkan kapasitas ekonomi daerah secara agregat.

3. Masih dominannya peran sektor industri pengolahan migas dan kimia dalam struktur ekonomi Kota Bontang menyebabkan stimulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui anggaran pembangunan daerah menjadi sangat lemah. Tantangan utama bagi pemerintah Kota Bontang adalah mendorong tumbuhnya investasi pada sektor-sektor diluar industri basis (industri migas dan kimia).

b. Prospek Perekonomian Daerah tahun 2016 dan 2017.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang telah tumbuh positif kembali pada tahun 2015 diharapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2016 dan 2017 akan terus mengalami perbaikan, meskipun secara gradual.

1. Tren penurunan kontribusi sektor industri pengolahan migas secara gradual diharapkan dapat disubstitusi oleh berkembangnya peran sektor-sektor ekonomi lainnya yang berbasis pada kapasitas lokal. Hal ini sejalan dengan sasaran kebijakan pembangunan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 untuk melakukan percepatan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis SDA tak terbarukan menjadi ekonomi berbasis SDA terbarukan.
2. Ditetapkannya Kota Bontang sebagai daerah cluster industri berbasis migas dan kondensat diharapkan dapat menjadi stimulus untuk peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja.
3. Telah terbukanya jalur pelayaran Bontang – Pare-Pare merupakan salah satu potensi bagi perkembangan sektor ekonomi tersier seperti perdagangan dan jasa-jasa.
4. Stimulus dari rencana kebijakan Pemerintahan Baru untuk memperkuat sektor maritim memberikan harapan bagi inisiasi perkembangan sektor ekonomi maritim Kota Bontang sebagaimana arah kebijakan pembangunan ekonomi dalam RPJPD Kota Bontang tahap ke-3 (2015-2018) yaitu membangun struktur ekonomi maritim dengan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan non-migas yang kuat.

c. Kerangka Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Bontang

Berdasarkan tantangan dan prospek perkembangan ekonomi Kota Bontang tahun 2016 dan 2017 dan hasil analisis terhadap sejumlah indikator makro Kota Bontang, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang diperkirakan akan terus tumbuh positif pada kisaran 3-4,5 persen. Tren perbaikan ekonomi ini diharapkan dapat menjadi salah satu pijakan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2016. Sebagai tahun transisi antara periode RPJMD 2011-2016 menuju periode RPJMD 2016-2021, fokus kebijakan pembangunan ekonomi mengacu pada RPJPD Kota Bontang 2005-2025 tahap ke -3 (2015-2019),

dimanakerangka kebijakan pembangunan ekonomi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperkuat pertumbuhan sektor industri non-migas dan sektor maritim. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan percepatan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis SDA tak terbarukan menjadi ekonomi berbasis SDA terbarukan.
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui perbaikan tatakelola birokrasi dan perijinan yang lebih efisien dan peningkatan daya dukung infrastruktur dan suprastruktur penghubung antara sektor maritim, industri non migas, industri migas, perdagangan dan Jasa.
3. Menjaga stabilitas perekonomian Kota Bontang dengan mendorong pelaku sektor industri migas untuk tetap mempertahankan kapasitas produksinya.
4. Meningkatkan peran industri strategis nasional yang beroperasi di Kota Bontang dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi Kota Bontang bagi meningkatnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyerahan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi pada perlu dilakukannya penyesuaian yang sangat signifikan khususnya menyangkut manajemen keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan merumuskan arah kebijakan mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kota Bontang pada tahun 2016 secara umum diarahkan:

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2016 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (*sustained*), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

2. Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2016
3. Kebijakan pembiayaan tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kebijakan perencanaan anggaran pendapatan Kota Bontang dalam RKPD tahun 2016 yang merupakan tahun transisi masih mengacu kepada kebijakan keuangan daerah dalam RPJMD Tahun 2011-2016. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan target anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016, juga disesuaikan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal pada Pemerintah Daerah. Kondisi eksternal khususnya menyangkut perkembangan kondisi perekonomian nasional pada tahun berjalan dan yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai langkah antisipatif dan solusi bagi peningkatan serta penetapan target pendapatan daerah di tahun 2016 didukung dengan beberapa asumsi dalam penetapan target pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target perencanaan pendapatan daerah tahun 2016, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang mencakup:

1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;
- b. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh dengan meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- c. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;
- d. Regulasi Peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi);
- e. Mengefektifkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni PDAM; Perusda Aneka Usaha Jasa; termasuk di dalamnya BPR/BKK untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah;
- f. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.
- g. Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2016, diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai pencerminan kesungguhan Pemerintah Daerah melakukan sumber-sumber pendapatan potensial daerah dan dana perimbangan untuk mewujudkan otonomi dan kemandirian daerah yang didasarkan pada optimalisasi potensi daerah. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai ditetapkan target pendapatan yang telah ditetapkan, antara lain: melalui ekstensifikasi dengan penetapan objek pajak baru.

2. Kebijakan Dana Perimbangan

Kebijakan perencanaan pendapatan sumber dana perimbangan dalam RKPD 2016 Perubahan ini berpedoman pada asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam penyusunan APBN Perubahan tahun 2016.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut beberapa komponen Dana Perimbangan khususnya dari sektor DBh Migas, diproyeksikan mengalami penurunan alokasi sebagai konsekuensi logis dari menurunnya asumsi ekonomi makro yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. beberapa asumsi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan pagu Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2016 Perubahan menggunakan pagu definitif sesuai alokasi dari Pusat dan Provinsi.
 - b. Perubahan asumsi dasar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah menetapkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika menjadi Rp13.500,00 per US \$.
 - c. Asumsi Harga ICP ditetapkan pada level 35 US \$/ barel.
 - d. Lifting minyak 820 ribu barel per hari.
 - e. Lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak per hari
3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- a. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kota merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Terhadap kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, maka dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan realisasi pendapatan hingga semester satu tahun 2016 serta asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam APBDP tahun 2016 di atas, secara keseluruhan Pendapatan Daerah Kota Bontang dalam RKPD tahun 2016 Perubahan ini diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan dengan proyeksi yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2016 sebelum perubahan. Sumber pendapatan daerah yang mengalami penurunan signifikan adalah dari Dana Perimbangan dan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada komponen Dana Perimbangan terjadi penurunan proyeksi penerimaan dari sumber Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dimana pada RKPD tahun 2016 sebelum perubahan diproyeksikan sebesar Rp.966.153.127.690,00, dalam RKPD Perubahan diperkirakan hanya sebesar Rp.655.884.055.165,68. Sedangkan pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah seluruh sumber-sumber penerimaannya mengalami penurunan cukup signifikan. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Perubahan selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bontang 2013-2017

NO	URAIAN	2013 (Realisasi)	2014 (Realisasi)	2015 (Realisasi)	Target 2016	Target Tahun 2016 Perubahan	2017 (Proyeksi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	125.663.166.385,87	160.367.872.157,65	142.424.180.607,86	122.740.000.000,00	147.949.932.920,33	128.501.604.000,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	51.768.747.070,00	85.510.814.538,48	56.524.423.482,00	52.300.000.000,00	67.555.000.000,00	61.105.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.729.690.011,51	4.834.719.564,38	6.699.402.396,64	3.940.000.000,00	5.231.800.000,00	3.940.100.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Bagian Laba Usaha	7.243.464.076,74	6.300.524.567,09	5.154.371.245,26	8.000.000.000,00	4.547.569.478,33	5.000.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.921.265.227,62	63.721.813.487,70	74.045.983.483,96	58.500.000.000,00	70.615.563.442,00	58.456.504.000
1.2	Dana Perimbangan	1.004.128.296.521,00	1.028.580.014.543,00	1.004.702.597.328,00	1.174.718.153.690,00	1.046.081.685.015,68	1.039.901.051.000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	864.018.968.521,00	875.394.238.543,00	797.314.031.328,00	966.153.127.690,00	655.884.055.165,68	762.095.322.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum/Subsidi Daerah Otonom	140.109.328.000,00	153.185.776.000,00	104.682.726.000,00	104.682.726.000,00	202.805.729.000,00	202.805.729.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus/Dana Pembangunan Daerah	-	-	102.705.840.000,00	103.882.300.000,00	187.391.900.850,00	75.000.000.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	279.985.912.239,76	266.095.537.535,43	204.968.589.996,60	269.547.365.050,00	132.326.655.000,00	187.908.950.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	166.434.296.600,00	146.236.046.600,00	145.108.405.050,00	181.646.575.050,00	96.007.710.000,00	145.908.950.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	24.694.230.000,00	37.364.636.000,00	28.887.693.000,00	35.995.490.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	86.532.600.000,00	78.989.105.250,00	28.905.300.000,00	51.405.300.000,00	31.268.945.000,00	35.000.000.000
1.3.6	Penerimaan Lain-Lain	2.324.785.639,76	3.505.749.685,43	2.067.191.946,60	500.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)		1.409.777.375.146,63	1.455.043.424.236,08	1.352.095.367.932,46	1.567.005.518.740,00	1.326.358.272.936,01	1.356.311.605.000,00

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kota Bontang.

Mengacu pada realisasi pendapatan daerah Kota Bontang dalam periode tahun 2013-2015 sebagaimana tabel 3.7, menunjukkan bahwa pendapatan daerah mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2015. Pendapatan Daerah tahun 2015 mengalami penurunan Rp.102,9 Milyar lebih jika dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2014. Seluruh komponen pendapatan daerah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014. Tidak terkecuali PAD yang pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global kelihatannya memberikan dampak cukup signifikan terhadap sektor-sektor ekonomi di Kota Bontang dan selanjutnya berdampak pula terhadap penerimaan daerah.

Mengingat PAD merupakan salah satu indikator penting yang merepresentasikan baiknya kinerja pembangunan daerah, kebijakan-kebijakan untuk terus mendorong peran dan kontribusinya dalam struktur pendapatan daerah perlu dan akan terus ditingkatkan.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemerintah Kota Bontang akan terus melaksanakan upaya-upaya dan strategi sebagai berikut:

- 1) Sektor Pajak Daerah dan Retribusi diharapkan memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memaksimalkan sektor ini, perlu adanya dukungan peraturan daerah sebagai Landasan Hukum pemungutan yang kuat serta aparatur yang berkualitas dan kapabel dalam melakukan pemungutan.
- 2) Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan tanpa harus menambah beban kepada masyarakat. Dalam hal ini ditekankan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak dan retribusi sehingga iklim yang kondusif tetap terjaga untuk pengembangan dunia usaha.
- 3) Komponen Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan sumber utama dalam Pendapatan Daerah Kota Bontang, sehingga upaya peningkatan koordinasi yang intensif dengan seluruh pihak yang terkait dalam rangka peningkatan penerimaan

Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mutlak untuk dilaksanakan.

- 4) Kemungkinan penurunan alokasi dari beberapa komponen Dana Perimbangan dibandingkan alokasi pada Tahun 2015, khususnya terkait dengan sumber pendapatan dari dana Alokasi Umum.
- 5) Peningkatan dari sektor Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi diperoleh dari adanya perubahan yang mendasar mengenai tarif maupun peningkatan alokasi bagi hasil, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Untuk mencapai target yang pendapatan daerah, maka pemerintah daerah berupaya melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Bontang, antara lain :
 - Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD melalui penggalan/perluasan sumber-sumber PAD yang produktif, ekstensifikasi dan kajian yang tidak menimbulkan biaya tinggi;
 - Melakukan perhitungan potensi PAD yang tersedia, baik menyangkut pajak daerah maupun retribusi daerah;
 - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan fungsi PAD dalam pembangunan daerah;
 - Membuat sistem database wajib pajak dan retribusi yang valid dan komprehensif.
 - Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.
- b) Untuk Dana Perimbangan, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bontang antara lain :
 - Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan antara pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Pusat
 - Memperjuangkan agar Kota Bontang tetap memperoleh Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.
 - Mempertimbangkan segala asumsi dan Peraturan-Peraturan yang ada dengan lebih cermat, sebagai acuan menentukan target dana perimbangan.
- c) Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kebijakan yang ditempuh antara lain :
 - Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk syarat memperoleh Dana Penyesuaian;
 - Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka memperoleh alokasi Bantuan Keuangan yang dapat membiayai sebagian kegiatan pembangunan di Kota Bontang, serta dalam rangka peningkatan akurasi perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja, yaitu : Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, dan Belanja Modal.

Arah kebijakan belanja tahun 2016 dilaksanakan melalui mekanisme belanja langsung SKPD dan belanja tidak langsung, dengan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu: belanja pegawai, belanja bunga, dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan termasuk di dalamnya belanja modal yang dialokasikan secara tahun jamak (multi years) yang harus dialokasikan pada tahun 2016.

Untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, proporsi belanja langsung diupayakan mendapatkan alokasi lebih besar daripada belanja tidak langsung dan proporsi belanja modal yang lebih besar daripada belanja pegawai. Hal ini merupakan salah satu kebijakan anggaran belanja yang terus diupayakan sebagai cerminan keberpihakan pengalokasian anggaran untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan seperti ini diharapkan alokasi anggaran pembangunan dapat secara langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat akan berbagai pelayanan pembangunan.

Pada tahun 2016 anggaran belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.786.887.399.000,-, namun dalam RKPD tahun 2016 Perubahan alokasi belanja daerah dilakukan penyesuaian sehubungan dengan turunnya target penerimaan pendapatan daerah. Target belanja daerah ditetapkan menjadi Rp. 1.352.380.449.720,-, mengalami pengurangan sebesar Rp. 434.506.949.280,- atau 24,3 persen dibandingkan target Belanja Daerah dalam RKPD tahun 2016 sebelum perubahan. Penyesuaian belanja terjadi baik pada komponen Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, dengan persentase penurunan masing-masing 6,95 persen dan 30,78 persen. Rancangan struktur belanja tahun 2016 selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013-2017

Kode Rekening	URAIAN	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Target Tahun 2016 Perubahan	Proyeksi Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	BELANJA DAERAH	1.488.260.558.664,36	1.388.006.250.627,31	1.664.595.109.458,00	1.786.887.399.000,00	1.352.380.449.720,00	1.279.311.605.000,00
5.1	Belanja Tidak Langsung	388.711.335.178,39	354.668.799.928,31	436.074.019.636,00	484.975.000.000,00	451.289.455.640,00	410.477.145.000,00
5.1.1	Belanja Pegawai	289.168.311.869,39	318.796.022.231,31	374.793.455.166,00	443.000.000.000,00	400.311.142.640,00	396.002.145.000,00
5.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	0	-
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	0	-
5.1.4	Belanja Hibah	95.959.399.080,00	34.496.482.531,00	58.804.311.220,00	35.000.000.000,00	22.206.425.000,00	10.000.000.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.332.086.000,00	1.029.342.000,00	-	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	0	-
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	458.399.394,00	346.953.166,00	358.308.050,00	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.793.138.835,00	-	2.117.945.200,00	1.500.000.000,00	27.296.888.000,00	2.500.000.000,00
5.2	Belanja Langsung	1.099.549.223.485,97	1.033.337.450.699,00	1.228.521.089.822,00	1.301.912.399.000,00	901.090.994.080,00	868.834.460.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	94.123.008.283,00	89.898.725.217,00	104.318.039.434,00			
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	451.579.892.676,97	491.435.680.898,00	532.581.490.489,00			
5.2.3	Belanja Modal	553.846.322.526,00	452.003.044.584,00	591.621.559.899,00			
	Jumlah Belanja	1.488.260.558.664,36	1.388.006.250.627,31	1.664.595.109.458,00	1.786.887.399.000,00	1.352.380.449.720,00	1.279.311.605.000,00

Kebijakan pengalokasian Belanja Tidak Langsung pada tahun 2016 ditujukan untuk penyediaan lima pos belanja; Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga. Pos Belanja Pegawai sebesar Rp.443.000.000.000,- dilakukan penyesuaian dalam RKPD Perubahan menjadi Rp.400.311.142.640,-.Demikian pula halnya pada alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial juga dilakukan penyesuaian, kecuali Belanja Tak Terduga justru mengalami peningkatan dimana hal ini sehubungan dengan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah.

Pada pos Belanja Langsung secara umum diarahkan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihandengan sasaran utama melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Kebijakan pengalokasian Belanja Langsung pada tahun 2016 yang merupakan tahun transisi dari RPJMD Kota Bontang yang berakhir tahun 2015, mengacu pada ketentuan Permendagri No 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa pada masa transisi Penyusunan RKPD dan RAPBD mengacu pada RPJMD sebelumnya dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Dengan demikian secara umum kebijakan pengalokasian Belanja Langsung diarahkan pada penyelesaian target dan sasaran pembangunan yang belum tercapai pada tahun 2015, pemenuhan anggaran bidang-bidang pembangunan sebagaimana amanat undang-undang seperti anggaran pendidikan dan kesehatan, pencapaian target-target SPM, dan program-program dalam rangka mendukung kebijakan provinsi dan nasional.

Belanja pembangunan dalam RKPD tahun 2016 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan pendidikan dalam rangka menjamin akses pendidikan untuk semua, tuntas, dan berkualitas wajib belajar 12 tahun;
2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan memberi perhatian yang lebih besar pada program dan kegiatan yang bersifat preventif dan promotif.
3. Peningkatan kualitas tenaga kerja dalam rangka pengembangan daya saing yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja lokal, regional dan nasional;
4. Peningkatan kinerja daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan program-program pemberdayaan yang bersinergi dengan program-program CSR, serta mengoptimalkan peran lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat;

5. Mengembangkan dan memperkuat kebijakan pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup.
6. Pengembangan Iklim Investasi Dan Peluang Usaha yang kondusif melalui penyederhanaan birokrasi layanan perijinan agar lebih cepat, mudah, murah, dan lebih baik;
7. Peningkatan peran sektor-sektor ekonomi produktif masyarakat dalam struktur ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing baik dari sisi produksi maupun kualitas.
8. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi daerah dalam rangka mengembangkan sektor industri;
9. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan termasuk belanja modal yang telah ditetapkan dengan kontrak tahun jamak. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD serta belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 4 (empat) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2017

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Penetapan Tahun 2015	Target Tahun 2016	Target Tahun 2016 Perubahan	Proyeksi Tahun 2017
-1	-2	-4	-5	-6	-7		
3.1	Penerimaan pembiayaan	457.579.223.218,52	329.096.039.700,76	220.000.000.000,00	225.000.000.000,00	26.022.176.783,99	125.000.000.000,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	457.579.223.218,52	329.096.039.700,76	220.000.000.000,00	225.000.000.000,00	26.022.176.783,99	125.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0		0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0		0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0		0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0		0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0		0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	457.579.223.218,52	329.096.039.700,76	220.000.000.000,00	225.000.000.000,00	26.022.176.783,99	125.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	50.000.000.000,00	50.685.000.000,00	6.926.295.000,00	5.118.120.000,00	0	10.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	50.000.000.000,00	50.685.000.000,00	6.926.295.000,00	5.118.120.000,00	0	10.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.685.000.000,00	6.926.295.000,00	5.118.120.000,00	0	10.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	236.241.846.792,19	356.894.223.218,52	213.073.705.000,00	219.881.880.000,00	26.022.176.783,99	115.000.000.000,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada kurun waktu tiga tahun yang akan datang APBD Kota Bontang masih terjadi defisit anggaran, karena masih adanya selisih lebih belanja daerah dibandingkan pendapatan daerah, sehingga diperlukan perhitungan yang cermat dan hati-hati pada aspek pembiayaan baik menyangkut penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Penerimaan pembiayaan tahun 2016 seluruhnya diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun (SiLPA) 2015 yang diproyeksikan mencapai Rp. 225.000.000.000,-. Dalam RKPD Perubahan ini target SiLPA mengalami koreksi menyesuaikan dengan hasil audit BPK terhadap pelaksanaan APBD tahun 2015. Besaran SiLPA ditetapkan menjadi hanya sebesar Rp. 26.022.176.783,99. Seluruh SiLPA tersebut dialokasikan untuk menutup deposit anggaran belanja tahun 2016 Perubahan, sehingga Jumlah Belanja Langsung yang dapat dibiayai dalam APBD tahun anggaran 2016 perubahan berjumlah Rp. 1.352.380.449.720,00. Pada tahun 2017, Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA diproyeksikan sebesar Rp. 125.000.000.000,-.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, pada tahun 2016 Perubahan tidak dialokasikan Pengeluaran Pembiayaan.

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI